

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI UPT PUSKESMAS SITUBONDO KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO

Daniev Syahirul Iqbal¹, Senain², Farida Hanum³.

^{1,2,3}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: Zdanif123@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengatahui implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di UPT Puskesmas Situbondo Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Teknik analisis data menggunakan kualitatif secara interaktif. Hasil penelitian bahwa 1) Sasaran dari program pencegahan *stunting* adalah Ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran. 2) Kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik meliputi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri, pemeriksaan kesehatan dan status gizi dan spesifik meliputi pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemberian TTD, pelaksanaan screening imunisasi tetanus toxoid (TT) serta pemberian imunisasi TT wanita usia subur. 3) Strategi pendekatannya melalui strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga. Penyuluhan dengan kemandirian keluarga melalui peningkatan kemampuan untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi. 4) Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 5) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting*.

Kata kunci:Implementasi, Pencegahan, *Stunting*

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the implementation of Situbondo Regent Regulation Number 45 of 2022 concerning the Acceleration of Stunting Reduction at the Situbondo Health Center UPT, Situbondo District, Situbondo Regency. The research method used is Qualitative. The data analysis technique uses qualitative interactively. The results of the study are that 1) The targets of the stunting prevention program are pregnant women and children aged 0-2 years or households with the first thousand days of birth. 2) Activities to accelerate stunting reduction through specific interventions include providing Rematri Blood Supplement Tablets (TTD), health checks and nutritional status and specifically include health checks for prospective brides and grooms, providing TTD, implementing tetanus toxoid (TT)

immunization screening and providing TT immunization for women of childbearing age. 3) The approach strategy is through health and nutrition education strategies through family independence. Counseling with family independence through increasing the ability to recognize, assess and take action independently accompanied by health workers and community providers, periodically, continuously and integratedly. 4) The source of funding for the Acceleration of Stunting Reduction comes from the regional revenue and expenditure budget, village revenue and expenditure budget and/or other legitimate sources in accordance with the provisions of the Laws and Regulations. 5) Guidance and supervision are carried out by the Regent to provide guidance and supervision on the implementation of the Stunting prevention program.

Keywords: Implementation, Prevention, Stunting

PENDAHULUAN

Penanggulangan *stunting* perlu tanggung jawab bersama, baik dari Pemerintah ataupun masyarakatnya itu sendiri. *Stunting* dapat berdampak bagi kehidupan dimasa yang akan datang dan bukan hanya berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Mulai dari pemenuhan gizi anak yang baik dalam 1000 hari pertama dan menjaga lingkungan tetap baik bersih dan sehat. Anak *stunting* penyebab utamanya asupan gizi. Tak satupun penelitian yang mengatakan keturunan memegang faktor yang lebih penting daripada gizi dalam hal pertumbuhan fisik anak. (Kesmas RI, 2018) Masyarakat, umumnya menganggap pertumbuhan fisik sepenuhnya dipengaruhi faktor keturunan. Pemahaman keliru itu kerap menghambat sosialisasi pencegahan *stunting* yang semestinya dilakukan dengan upaya mencukupi kebutuhan gizi sejak anak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Gizi buruk adalah salah satu hal yang menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun bayinya.(Kesmas RI, 2018)

Di samping itu, untuk menangani masalah *stunting* diperlukan komitmen dari aparat desa setempat. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Pengetahuan aparat desa teraktualisasi seiring bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas pemerintahan desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya suksesnya penanganan masalah *stunting* secara efektif dan efisien. Menurut penelitian Wulandari (2017) tentang analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa menyatakan bahwa aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik untuk menyelesaikan program desa, termasuk masalah kesehatan seperti *stunting*.

Beragam penanganan *stunting* juga terwadahi melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang pemanfaatan dana desa. Melalui peraturan tersebut, warga desa terlibat aktif dan inovatif menghadirkan beragam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan *stunting*. Penelitian Hafid (2016) tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Mangilu Kecamatan Bungoro menyatakan bahwa dana desa yang merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk membiayai pembangunan dan perberdayaan masyarakat ternyata terbukti efektif, dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa baik dalam pelaksanaan, kemanfaatan, dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatannya. Namun, menurutnya dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa tersebut masih mengalami kendala seperti lambatnya pencairan dana desa dan minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan dana desa.

Upaya selanjutnya yang juga penting untuk mengatasi masalah *stunting* adalah inovasi di bidang gizi yang dilakukan oleh desa. Program inovasi ini mempunyai tujuan utama menekan angka *stunting* dengan kelompok sasaran berisiko *stunting* yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita. Dengan adanya inovasi di bidang gizi, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu dengan balita. Menurut Anggraeni (2013) tentang inovasi kesehatan di Puskesmas, menyatakan bahwa inovasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan. *Stunting* hanya dapat ditangani secara optimal melalui kolaborasi, koordinasi dan konvergensi intervensi yang multisektoral. Oleh karena itu penguatan kolaborasi, peran, dan kontribusi elemen yang didalamnya meliputi unsur pemerintah daerah, akademisi dan peneliti, pelaku usaha, media, dan kelompok masyarakat merupakan hal yang esensial untuk memastikan pendekatan multisektoral tersebut.

Kabupaten Situbondo terpilih sebagai salah satu wilayah yang mendapat intervensi penanganan penurunan *stunting* pada tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI. Sementara secara akumulatif angka *stunting* di Kota Santri ini tercatat juga tinggi. Yakni berada pada angka 26,74 persen. "Angka *stunting* ini tinggi, secara komulatif tingkat Kabupaten 26,74. Dinkes membahas secara detail melalui Rembuk *Stunting*. Bung Karna juga meminta agar Dana Desa (DD) turut diarahkan untuk penanganan kasus *stunting*. Namun memang perlu dikaji terlebih dulu, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)."Paling tidak diarahkan untuk penanganan *stunting*. Khususnya bagi gizi buruk kaum dhuafa, barangkali desa menyediakan makanan yang memiliki gizi bernilai tinggi. Untuk perencanaan intervensi dari Kementerian Kesehatan RI.

Peningkatan dan penurunan angka *stunting* dari tahun ketahun di setiap desa diwilayah UPT. Puskesmas Situbondo. Hal tersebut juga membuktikan bahwa wilayah Situbondo merupakan salah satu wilayah yang angka *stunting*nya perlu di perhatikan. Maka dari itu pemerintah wilayah naungan UPT. Puskesmas Situbondo sudah menjalankan

program pemerintah tentang penurunan angka stunting.

Upaya yang dilakukan meliputi program edukasi bagi calon pengantin, edukasi bagi pengantin baru, pengontrolan rutin per bulan untuk ibu hamil, pengontrolan 1000 hari pertama untuk anak yang baru dilahirkan, pemberian makanan tambahan untuk anak, pemeriksaan rutin untuk anak yang terindikasi stunting, serta pemberian vitamin untuk anak. Program-program tersebut diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Kecamatan Situbondo tersebut.

Masih terdapat kekurangan dan kesenjangan masalah kesehatan yang makin kompleks di Desa dalam naungan UPT. Puskesmas Situbondo seperti belum efektifnya program-program pencegahan *stunting* dan belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan. Dengan adanya kekurangan dalam hal program penurunan stunting memicu kurang maksimalnya target yang diinginkan pemerintah dalam program tersebut. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi di lapangan seperti belum efektifnya program-program pencegahan *stunting* dan belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan. Maka dari itu, upaya strategis perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut terutama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang harus didukung oleh kerja sama dengan semangat kemitraan antar semua pelaku pembangunan hingga di tingkat desa dengan interelasi, interaksi, dan keterpaduan berbagai upaya yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai "Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di UPT Puskesmas Situbondo Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo"

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian dialakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimana data yang nantinya akan diperoleh berbentuk secuah cerita, kata-kata atau gambar yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan sehingga pembaca dapat memahami informasi yang diberikan dengan mudah (Sugiyono 2020). Penelitian deskriptif kualitatif juga merupakan sebuah penelitian tentang individu/perorangan, organisasi, program kegiatan atau bahkan.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu di UPT Puskesmas Sitbodno yang terletak di Dusun Talkandang Timur Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Jawa Timur, Kode Pos 68315. Penelitian ini dilaksanakan guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar peneliti dapat menemukan jawaban atas masalah yang telah ditentukan. Waktu penelitian selama kurang lebih 3 bulan yaitu pada tanggal 01 April sampai dengan tanggal 28 Juni 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan (Sugiyono, 2016:137). Teknik ini dilakukan untuk pengumpulan data melalui wawancara dengan para informan.

Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip Moleong (2016:174) bahwa ada beberapa alasan mengapa metode observasi banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, salah satu alasannya adalah: “teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya”. Jadi metode ini menggunakan alat indera guna memahami dan memperhatikan objek yang diteliti secara langsung. Bentuk pengamatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2016:145). Objek observasi pada penelitian ini adalah masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Situbondo Kecamatan Situbondo.

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi dalam hal ini adalah data-data yang didapat langsung dari UPT Puskesmas Situbondo Kecamatan Situbondo.

Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono 2016:244) mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2011:20). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dari Pengumpulan data, Reduksi Data,

Penyajian Data, Menarik Kesimpulan/Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Pasal 4 Tentang Ruang Lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dijelaskan dari hasil penelitian sebagai berikut:

Program Percepatan Pencegahan *Stunting* merupakan program prioritas pemerintah yang didukung oleh pimpinan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan pemerintah desa. Bahkan ada 23 Kementerian/ Lembaga yang dikerahkan untuk berkolaborasi dalam pencegahan *stunting*. Masing-masing Kementerian/Lembaga diharapkan dapat saling berkoordinasi dan berkonsolidasi pada tugas dan fungsi masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendukung pencegahan *stunting*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan *stunting* adalah Ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran. Ini karena kebutuhan akan kecukupan gizi bagi anak-anak adalah sejak masa kehamilan. Sehingga sejak masa kehamilan tersebut, harus dipastikan kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi bagi ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Pemantauan kesehatan dan kecukupan gizi ini harus terus dilakukan sampai anak minimal memasuki usia dua tahun, usia lima tahun bahkan sampai dengan menginjak usia remaja. Karena pada masa tersebut sedang terjadi masa pertumbuhan, dimana sangat memerlukan asupan gizi yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan program prioritas yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang telah diatur di Perbup No 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Program percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan di wilayah UPT Puskesmas Situbondo. Dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik dan spesifik. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik meliputi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri, pemeriksaan kesehatan dan status gizi dan spesifik meliputi pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksozoid (TT) serta pemberian imunisasi tetanus toksozoid (TT) wanita usia subur (WUS). Dalam kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak). Kegiatan di posyandu salah satunya penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi, pelaksanaan fortifikasi bahan pangan, penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *stunting*, penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN), penyediaan jaminan persalinan (Jampersal) universal, pemberian pendidikan pengasuhan

pada orangtua, pemberian pendidikan anak usia dini universal, pemberian pendidikan gizi masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024. Strategi untuk percepatan penurunan *stunting* perdesaan, disusun untuk menetapkan program-program dan intervensi kegiatan dengan fokus pada pencegahan dan penanganan gizi buruk dan kronis balita dan ibu perdesaan agar tidak berlanjut menjadi kejadian *stunting* perdesaan. Mengacu kepada teori dan penelitian terdahulu, telah diidentifikasi faktor yang berpengaruh menyebabkan terjadinya *stunting*. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga. Edukasi kesehatan dan gizi berkaitan dengan upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga. Penyuluhan dengan kemandirian keluarga melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi. Edukasi pentingnya kemandirian keluarga yang meliputtingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi, tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi, upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizidanpemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

APBN memuat anggaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor. Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undanga. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan. Penurunan *stunting* merupakan program prioritas nasional sehingga perlu disediakan anggaran khusus melalui DAK yang diberikan dalam berbagai macam alokasi, yakni melalui bantuan operasional kesehatan *stunting*, bantuan operasional keluarga berencana, serta dana ketahanan pangan dan pertanian. Anggaran penurunan *stunting* dari APBN disalurkan melalui Pemerintah Provinsi-Kabupaten/Kota sesuai kewenangan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Alokasi anggaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari orkestrasi dengan dana daerah sendiri untuk menurunkan *stunting*.

Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib melaksanakan upaya penurunan prevalensi *stunting* secara terintegrasi melalui aksi konvengensi percepatan pencegahan *stunting* yang merupakan salah

satu program prioritas nasional tahun 2024 dan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu program prioritas daerah. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting*. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati ditujukan untuk meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*, meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan *Stunting*, meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan *Stunting*. Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya pada Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stuntingdi UPT Puskesmas SitubondoKecamatan Situbondo Kabupaten Situbondomenurut Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati terdapat kesimpulan yakni 1) Sasaran, program ini yang meliputi ibu hamil, anak usia 0-2 tahun atau rumah tanggal dengan seribu hari pertama kelahiranremaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu menyusui dan balita. sasaran tersebut sudah ter implementasi dengan baik dibuktikan dari adanya program yang diikuti oleh masyarakat yang memiliki kriteria sesuai dengan sasaran yang diinginkan pemerintah. 2) Kegiatan, pada program ini berjalan dengan baik di buktikan dengan adanya beberapa program seperti posyandu yang dapat di terima baik di kalangan masyarakat sesuai dengan sasaran yang di inginkan oleh pemerintah seperti anak usia dini, ibu hamil dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan sasaran yang di inginkan oleh pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan juga mampu dalam menurunkan tujuan program ini yaitu menurunkan angka stunting yang terjadi di kabupaten Situbondo kecamatan Situbondo. 3) Strategi pendekatan dilakukan dalam kegiatan ini adalah pemberian edukasi melalui kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan serta melalui kemandirian keluarga. Sejauh ini strategi yang digunakan dapat ber implementasi dengan baik karena strategi tersebut mampu menarik minat serta mampu untuk mencapai tujuan program penurunan stunting ini. 4) Biaya yang digunakan pada program ini seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut karena program ini merupakan program yang di turunkan langsung oleh pemerintah.

Pembayaran tersebut tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dibuktikan dengan pemberian fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan pengajuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program seperti pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan yang baik terhadap balita hal ini bertujuan untuk para orang tua mengetahui salah satu makanan yang baik di konsumsi oleh anak-anak. 4) Pembinaan dan pengawasan dikakukan langsung oleh

pemerintah serta petugas yang berwenang seperti pemerintah pusat kabupaten, serta petugas dari puskesmas wilayah tersebut. Hal ini dapat berjalan dengan baik karena bupati sering melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada masyarakat untuk mengontrol program tersebut. Tidak hanya hal tersebut petugas puskesmas akan melakukan pembinaan dan pengawasan setiap program dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stuntingdi UPT Puskesmas SitubondoKecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu 1) Tujuan 14% penurunan angka stunting yang belum tercapai sehingga membutuhkan evaluasi lebih lanjut mengenai program yang di jalankan. 2) Adanya update kegiatan dan nuansa yang lebih inovatif sehingga para sasaran akan lebih giat dan lebih ingin mengetahui lebih banyak mengenai apa yang ada di dalam kegiatan tersebut. 3) Strategi pendekatan yang yang bisa dilakukan tidak hanya melalui edukasi akan tetapi juga bisa menggunakan praktek secara langsung serta di bimbing secara langsung. 4) Meskipun komunikasi yang dilakukan sudah dikatakan sangat baik akan tetapi para petugas pelaksana perlu meningkatkan adanya komunikasi sehingga para sasaran akan lebih merasa nyaman pada saat melakukan kegiatan. 5) Adanya pembiayaan dari pemerintah seharusnya para petugas lebih meberikan pengetahuan kepada sasaran tentang pemerintah mana yang memberikan pembiayaan secara spesifik.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Awan Y., Abdoellah, & Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Alwi. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Imron, Ali, 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniasih, E., et al,. 2010. *Sehat dan Bugar Berkat Gizi Seimbang*.Jakarta : PT Gramedia.
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. 2012. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia

- Siswati, T. 2018. *Stunting*. Yogyakarta: Husada Mandiri Poltekkes Kemenkes Solahudin, Kusumanegara. 2010. *Model Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta. Sunggono, Bambang. 2018. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu
- Suyanto, Bagong. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- UNICEF. 2013. *Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global*
- Wahab Abdul, Solichin, 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widodo, Joko. 2017. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Anggraeni, Cindy. 2013. Inovasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Iogir: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1, no. 1.
- Erik et al. 2020. Stunting Pada Anak Usia Dini (Study Kasus di Desa Mirat Kec Lewimunding Majalengka), Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), pp. 24– 36.
- Faturahman, B. M. 2018. Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. Publikasi Jurnal Universitas Brawijaya
- Hafid, Risma. 2016. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Skripsi : Universitas Hasanudin Makassar
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2016. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(01), 1–12.
- Sipayung, R.S.,2019. *Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Kontruksi Banguna Di Kota Yogyakarta*. S1 thesis, UAJY.
- Sukanti, dan Nur Faidati. 2021. Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman. Jurnal Caraka Prabu, 5(1), 91- 113
- Wulandari, S.2017. Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Skripsi.Universitan Hasanudin Makasar.Makasar.
- Kemenkes RI, 2011, *Pedoman Pelaksanaa Jaminan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Kemenkes.
- Kemenkes. 2018. *Anak. Panduan Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan

Penurunan Stunting

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Desa